



Pengaruh PDRB Perkapita, Populasi dan Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Kemiskinan di Pulau Sumatera: Perspektif Ekonomi Islam

Delvira Rahma Adinda*, Ruslan Abdul Ghofur, Citra Etika

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung
Jalan Letnan Kolonel H Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung, Indonesia
Email: ¹*delvirarahma@gmail.com, ²ruslanabdulghofur@radenintan.ac.id, ³citraetika@radenintan.ac.id

Email Penulis Korespondensi: delvirarahma@gmail.com

Submitted: 11/07/2025; Accepted: 02/08/2025; Published: 05/08/2025

Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PDRB perkapita, populasi penduduk, dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) terhadap kemiskinan di 10 Provinsi Pulau Sumatera selama periode 2019–2023 dalam perspektif ekonomi Islam. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), dan dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model regresi yang terpilih yaitu Fixed Effect Model (FEM). Analisis data menggunakan perangkat lunak EViews 10. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial PDRB perkapita memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di 10 Provinsi Pulau Sumatera, dengan nilai koefisien sebesar -0,000834 dan probabilitas sebesar 0,6233 ($> 0,05$), serta tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di 10 Provinsi Pulau Sumatera dengan nilai koefisien -1,669434 dan probabilitas sebesar 0,6618 ($> 0,05$), sementara populasi penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di 10 Provinsi Pulau Sumatera dengan nilai koefisien -0,057793 dan probabilitas sebesar 0,0047 ($< 0,05$). Secara simultan, PDRB perkapita, populasi penduduk, dan tingkat partisipasi angkatan kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di 10 Provinsi Pulau Sumatera dengan nilai *f*-statistic 1716,848 dan probabilitas *f*-statistic sebesar 0,000000 ($< 0,05$). Dalam perspektif ekonomi Islam, upaya penanggulangan kemiskinan juga harus melibatkan prinsip-prinsip keadilan seperti zakat dan wakaf. Temuan ini memberikan pengetahuan yang berguna teruntuk pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi efektif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Kemiskinan; PDRB Perkapita; Populasi Penduduk; Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja; Perspektif Ekonomi Islam.

Abstract—This study aims to analyze the influence of per capita GRDP, population, and labor force participation rate (TPAK) on poverty in 10 provinces on Sumatra Island during the 2019–2023 period from an Islamic economic perspective. The data used in this study are panel data sourced from the Central Statistics Agency (BPS), and analyzed using a quantitative approach with the selected regression model, the Fixed Effect Model (FEM). Data analysis using EViews 10 software. The results of this study indicate that partially GRDP per capita has a negative and insignificant effect on poverty in 10 Provinces of Sumatra Island, with a coefficient value of -0.000834 and a probability of 0.6233 (> 0.05), and Labor Force Participation Rate has a negative and insignificant effect on poverty in 10 Provinces of Sumatra Island with a coefficient value of -1.669434 and a probability of 0.6618 (> 0.05), while population has a negative and significant effect on poverty in 10 Provinces of Sumatra Island with a coefficient value of -0.057793 and a probability of 0.0047 (< 0.05). Simultaneously, GRDP per capita, population, and labor force participation rate together have a significant effect on poverty in 10 Provinces of Sumatra Island with an *f*-statistic value of 1716.848 and an *f*-statistic probability of 0.000000 (< 0.05). From an Islamic economic perspective, poverty alleviation efforts must also incorporate principles of justice, such as zakat and waqf. These findings provide useful insights for policymakers in formulating effective strategies to improve public welfare.

Keywords: Poverty; GRDP Percapita; Population; Labor Force Participation Rate; Islamic Economics Perspective.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi adalah suatu upaya yang direncanakan untuk memperbaiki aktivitas ekonomi suatu wilayah dan meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Untuk mencapai hal ini, pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai aspek yang paling penting. Namun keberhasilan dalam pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari seberapa besar pertumbuhan yang terjadi, tetapi juga dari seberapa merata manfaat pembangunan tersebut dirasakan oleh seluruh kelompok masyarakat. Jika aspek keadilan diabaikan, proses pembangunan bisa menimbulkan ketidaksetaraan dan menambah tingkat kemiskinan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pembangunan sangatlah penting dalam setiap usaha pembangunan ekonomi, (Manalu et al., 2024). Secara harfiah, pembangunan ekonomi adalah proses kenaikan dari pendapatan riil perkapita penduduk dalam jangka panjang yang disertai perbaikan kelembagaan, (Pangestuty & Prasetyia, 2021). Pembangunan ekonomi menjadi Grand Theory dalam penelitian ini. Menurut Teori Michael P. Todaro & Stephen C. Smith menyatakan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan oleh tiga nilai pokok yaitu bekembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (sustance), meningkatkan harga diri masyarakat sebagai manusia (self-esteem), dan meningkatnya kemampuan masyarakat (freedom from servitude). Dimana pembangunan ekonomi dapat dilihat sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dari satu tahap pembangunan ke tahap berikutnya, (Candrasa, n.d.)

Bank Dunia menekankan bahwa pemahaman mengenai kemiskinan seharusnya melibatkan berbagai dimensi dan memperhatikan sejumlah faktor yang berkontribusi pada ketidaksetaraan dan marginalisasi. Meskipun suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi, ketimpangan yang sangat tinggi dapat menimbulkan kesenjangan yang memisahkan kelompok tertentu dari akses terhadap sumber daya dan peluang, (Vania Grace Sianturi et al., 2021).

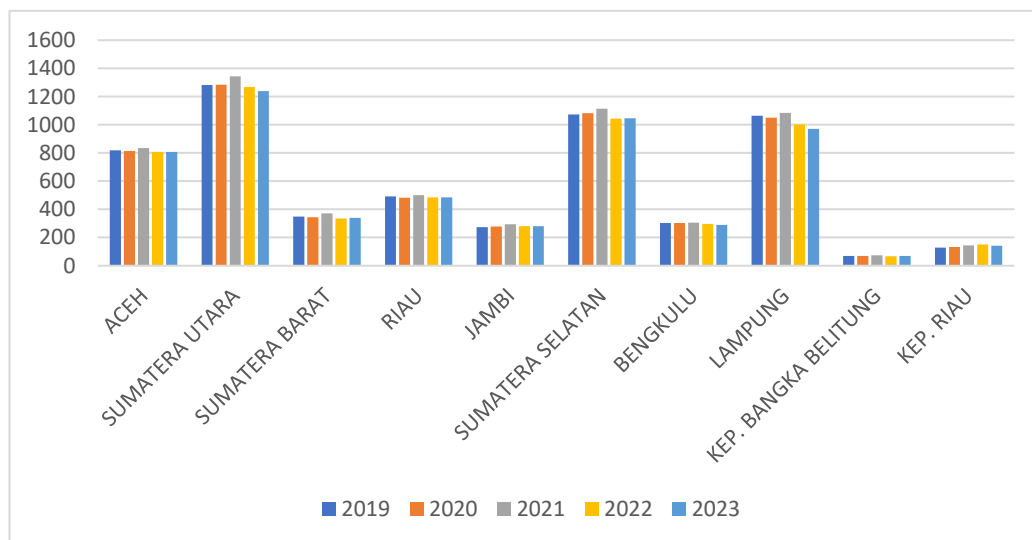


Oleh karena itu, untuk mengatasi kemiskinan, diperlukan tidak hanya pendekatan dari sisi keuangan tetapi juga upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan struktural dan sistemik yang dapat memperkuat lingkaran kemiskinan, (Rachmawati, 2020). Kemiskinan disebabkan oleh faktor alam, budaya, dan struktural, dan dapat dibagi menjadi dua jenis. Pertama, kemiskinan absolut, yaitu kondisi di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya karena berada di bawah batas minimum. Kedua, kemiskinan relatif, yaitu kondisi di mana ketimpangan pendapatan terjadi di antara kelompok-kelompok masyarakat yang mencerminkan ketidakmampuan untuk mencapai tingkat kesejahteraan umum di lingkungannya, (Gofur et al., 2025).

Menurut UNDP (United Nations Development Programme atau Badan Program Pembangunan PBB) orang miskin adalah mereka yang tidak mempunyai keahlian dan tidak mempunyai pekerjaan, akibatnya orang-orang ini tidak mempunyai pendapatan. Jika pun mereka mempunyai pendapatan, jumlahnya sangat tidak memadai untuk hidup. Oleh karena itu, mereka sangat bergantung pada orang lain dalam aktivitas sehari-hari, (Rachmawati, 2020). Kemiskinan sangat menghambat kehidupan sehari-hari seseorang. Kemiskinan juga dapat menyebabkan kesenjangan sosial dikarenakan tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya serta serba kekurangan dalam segi perekonomian juga dapat dikatakan miskin, (Oktavian Oki et al., 2023).

Kemiskinan di Indonesia tidak terdistribusi dengan seragam, melainkan beberapa provinsi menunjukkan angka kemiskinan yang rendah, sementara yang lain mencatat tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Pulau Sumatera, sebagai pulau terbesar di Indonesia dengan luas 480.854 km², memiliki kepadatan penduduk tertinggi kedua setelah Pulau Jawa, yang memiliki populasi sekitar 152.000.000 jiwa pada tahun 2019 sementara Pulau Sumatera jumlah penduduknya mencapai 58.455.800 jiwa. Oleh karena itu, penting bagi pembangunan ekonomi di pulau ini untuk mendapatkan perhatian yang besar, karena salah satu sasaran utama ekonomi Indonesia adalah untuk mencapai pemerataan. Selain itu, Pulau Sumatera juga memberikan kontribusi terhadap PDB terbesar kedua setelah Pulau Jawa, menandakan betapa pentingnya pulau ini baik dari segi jumlah penduduk maupun kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia, (Butar Butar et al., 2023).

Fenomena perkembangan penduduk miskin sepuluh provinsi di Pulau Sumatera mengalami fluktuasi antara peningkatan dan penurunan selama periode 2019 hingga 2023. Ini merupakan akibat dari pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, termasuk sepuluh provinsi di Sumatera sejak bulan Maret 2020. Untuk mengatasi efek dari Covid-19, pemerintah memberlakukan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dari tahun 2020 hingga 2022. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan banyak aktivitas masyarakat terbatas. Secara tidak langsung, hal ini mempengaruhi pengurangan aktivitas ekonomi di kalangan masyarakat. Dengan kata lain, pendapatan masyarakat juga mengalami penurunan, dan banyak yang kehilangan sumber penghasilan, terutama pada awal-awal masa pandemi Covid-19.



Gambar 1. Kemiskinan 10 Provinsi Pulau Sumatera Tahun 2019-2023

Berdasarkan grafik Gambar 1, dapat dilihat bahwa perkembangan tingkat kemiskinan di 10 Provinsi Pulau Sumatera mengalami fluktuasi selama periode 2019-2023. Pada tahun 2020 menjadi periode paling suram akibat dampak pandemic Covid-19, yang memberikan tekanan bagi aktivitas ekonomi di kawasan tersebut. Meski sempat mengalami kontraksi pada tahun tersebut, perekonomian di 10 provinsi Pulau Sumatera bangkit di tahun berikutnya. Memasuki tahun 2021, 10 provinsi Pulau Sumatera mengalami peningkatan. Daerah Sumatera Utara mencatatkan perkembangan kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatera sebesar 1343.86 ribu jiwa. Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung masing-masing mengikuti sebesar 1113.76 dan 1083.93 ribu jiwa. Di sisi lain, provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat kemiskinan 72.71 ribu jiwa, menjadikannya provinsi dengan kemiskinan paling rendah di antara provinsi-provinsi lain di Pulau Sumatera.

Dalam pandangan islam, kemiskinan dianggap sebagai ujian yang dapat melemahkan iman dan jiwa seseorang. Hidup dalam kemiskinan dapat menghambat seseorang dalam menjalankan kewajiban agama dengan sempurna,



membatasi akses pendidikan yang berkualitas, serta mengurangi kesempatan untuk memperoleh kehidupan dan layanan kesehatan yang layak. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya usaha untuk keluar dari kemiskinan dan melarang umatnya meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah, baik dalam hal agama, ilmu, maupun ekonomi, sebagaimana Allah SWT. berfirman dalam Q.S. Al'Araf ayat 96 :

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Artinya: “Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan”.

Dalam ayat Allah SWT memberikan perintah kepada umatnya untuk beriman dan bertakwa, karena iman dan takwa merupakan kunci keberkahan dalam kehidupan. Surat Al'Araf ayat 96 menjelaskan bahwa Allah menjajikan jika suatu penduduk dalam negeri beriman kepada-Nya dan menjalankan perintah-Nya dengan penuh ketaatan, maka Dia akan membuka pintu keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi, ketika seseorang berpaling dari kebenaran dan mendustakan ajaran Allah, maka bagi mereka akan menghadapi berbagai kesulitan, termasuk kemiskinan, bencana alam, dan ketidakstabilan sosial sebagai akibat dari perbuatan mereka sendiri. Salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan bukan hanya ketidakseimbangan ekonomi, tetapi kurangnya keberkahan akibat jauhnya manusia dari nilai-nilai agama. Ketika seseorang menjauhi kejujuran, keadilan, dan kebaikan, maka akan muncul berbagai kerusakan, seperti korupsi, kesenjangan sosial, dan eksploitasi yang semakin memperburuk kemiskinan. Oleh karena itu, Islam mendorong umatnya untuk tidak hanya bekerja keras secara lahiriah tetapi juga memperkuat iman dan takwa agar keberkahan Allah turun, sehingga kemiskinan dapat berkurang dan masyarakat hidup dalam kesejahteraan.

Faktor utama penyebab terjadinya kemiskinan yaitu PDRB perkapita, karena PDRB perkapita sering kali dijadikan tolak ukur bagi kemakmuran dan perkembangan suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat dipahami sebagai proses jangka panjang untuk meningkatkan produksi perkapita. Yang berarti, dari segi ekonomi, kesejahteraan diwujudkan melalui peningkatan produksi perkapita, juga memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat dalam mengakses barang dan jasa, dan pada akhirnya meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi kemiskinan. (Supriatna, 2023). Pendapatan perkapita sendiri merupakan pendapatan rata-rata penduduk suatu wilayah dalam periode tertentu yang dihitung dari pendapatan periode tertentu dibagi dengan jumlah populasi di wilayah tersebut. (Fanny Cantika Roseline, 2022). Pemerintah dan pembuat kebijakan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita untuk merancang program pembangunan, mengalokasikan anggaran, dan mengevaluasi efektivitas kebijakan ekonomi. Memahami PDRB perkapita memungkinkan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (Dadek, Ahmad et al., 2024). Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan memerlukan partisipasi semua pihak dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi sehingga kemiskinan, kesenjangan, dan pengangguran berkurang seiring dengan mulai berkembangnya ekonomi. (Oktaviani et al., 2024).

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebagian dari perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita dan meratanya distribusi pendapatan. Dalam ekonomi Islam, pertumbuhan ekonomi harus menciptakan keadilan dan harmoni. Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil, di mana setiap individu menerima hak-haknya secara penuh dan masyarakat saling mendukung untuk mencapai kesejahteraan (falah). (Janah et al., 2024).

Populasi Penduduk menjadi salah satu faktor terjadinya kemiskinan, dimana setiap tahun pertambahan jumlah penduduk yang tinggi tanpa diimbangi oleh dukungan ekonomi yang tinggi dapat menimbulkan berbagai masalah dan hambatan dalam pembangunan ekonomi seperti kesejahteraan penduduk suatu wilayah akan menurun. (Tando'Lembang & Kalangi, 2023). Pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol juga akan memunculkan berbagai permasalahan serta tantangan terhadap usaha yang dilakukan. Ini disebabkan oleh tingginya laju pertumbuhan populasi yang mempercepat penambahan tenaga kerja, sementara kemampuan suatu daerah untuk menyediakan pekerjaan baru sering kali sangat terbatas. Akibatnya, hal ini bisa memicu tingkat pengangguran dan membuat orang jatuh ke dalam kemiskinan. (Sari, 2021). Menurut Kranen burg dalam Susiatik (2020), penduduk suatu negara merujuk pada semua orang yang pernah tinggal di wilayah tersebut dan sering disebut sebagai "rakyat" atau orang-orang dari negara tersebut. Istilah "rakyat" dalam konteks ini mengacu pada sekelompok orang yang melangsungkan hidupnya bersama pada tempat tertentu dan berhubungan berdasarkan jenis kelamin. Pertumbuhan penduduk dapat didefinisikan sebagai perubahan jumlah penduduk dalam suatu wilayah dengan periode waktu tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya, dan indikator ini berguna untuk memprediksi jumlah penduduk di masa depan. Jumlah penduduk suatu daerah selalu berubah secara berkala karena adanya ketidakseimbangan antara kelahiran dan kematian, dimana jumlah kelahiran melebihi jumlah kematian, (Khasanah et al., 2024).

Dalam ekonomi Islam populasi penduduk dianggap sebagai potensi pembangunan apabila dikelola secara adil. Teori siklus pengeluaran penduduk yang dinyatakan oleh Ibnu Khaldun sebagai hubungan antara jumlah dengan tingkat pengeluaran. Apabila jumlah penduduk banyak maka pengeluaran juga meningkat. Kedua faktor itu saling menaikkan antara satu sama lain. Jumlah penduduk yang terlalu banyak akan menyebabkan kepadatan penduduk kota yang akhirnya akan menyebabkan penyakit dalam kelaparan. Manusia dikatakan sebagai manusia karena kemampuannya meyerap segala manfaat yang berguna bagi dirinya dan menghindar dari segala bahaya, serta karakternya dikendalikan untuk membuat usaha. (Hasibuan & Rukiah, 2023).



Selain faktor PDRB perkapita dan populasi penduduk, Kemiskinan dapat terjadi karena Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Semakin banyak jumlah angkatan kerja yang terserap maka semakin banyak pula peningkatan pendapatan yang secara langsung akan mengurangi jumlah penduduk miskin. Namun demikian apabila tingginya TPAK diikuti oleh peningkatan penduduk pencari kerja maka dikhawatirkan akan memicu tingginya angka pengangguran. Oleh karena itu, faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap kemiskinan adalah mengenai tenaga kerja yang diimplementasikan dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), (Matondang et al., 2024) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mencerminkan persentase populasi usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu ukuran untuk tingkat partisipasi penduduk dalam angkatan kerja yang mempersentasikan penduduk dalam usia kerja aktif dan tidak bekerja, (Todi et al., 2025). TPAK dihitung dengan membandingkan jumlah angkatan kerja dengan data jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun), yang memiliki potensi untuk memproduksi barang dan jasa, (Widodo, 2021).

Pada tataran makro aktivitas kerja masyarakat menjadi bagian faktor produksi yang sangat menentukan agregat produktivitas yang menjadi ukuran tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam hal ini negara mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kemampuan kerja masyarakat dan menyediakan lapangan pekerjaan. Ketidakkampuan masyarakat dalam bekerja akan menimbulkan kemiskinan. Oleh karena itu, bekerja dan berjerih payah dalam ekonomi islam merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang mampu meraih kesuksesan bahkan memiliki kejayaan tersendiri, (Azwina & Dharma, 2023).

Pada penelitian sebelumnya, bahasan tentang kemiskinan telah banyak dilakukan, namun terdapat perbedaan hasil yang menunjukkan oleh beberapa penelitian terdahulu. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Lestary Fitriany, menyatakan bahwa PDRB Perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. (Lestary Fitriany, 2021) Sementara hasil penelitian Sajida Miftah, dkk menyatakan PDRB Perkapita berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. (Miftah et al., 2025). Selanjutnya penelitian yang dilakukan Aisyah Farah Amalia menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. (A. F. Amalia et al., 2024). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Shidiq Ramdan Dinata menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. (Dinata et al., 2020). Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh Meyvi Rine Mirah, dkk menyatakan tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. (Mirah et al., 2020). Sementara penelitian yang dilakukan oleh Adelina F. Sianturi, dkk menyatakan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. (Sianturi et al., 2024). Oleh karena itu, temuan-temuan tersebut merupakan research gap pada penelitian ini dan pembaruan yang membedakan dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian dan jangka waktu atau periode yang digunakan.

Dari pengamatan penelitian yang telah diuraikan di atas, penulis ingin menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan dengan menelaah pada tiga indikator utama, yaitu PDRB perkapita, populasi penduduk dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Tujuan penelitian ini untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai bagaimana indikator tersebut berkontribusi terhadap kemiskinan yang berada di 10 provinsi Pulau Sumatera selama periode 2019-2023. Selain itu, penelitian ini juga memberikan wawasan mengenai kondisi kemiskinan tersebut dalam perspektif ekonomi islam, guna menambahkan pemahaman yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam islam.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Pendekatan metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Metode ini dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada pemahaman positifisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data digunakan menggunakan alat penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah dikembangkan, (Sugiyono, 2021).

2.2 Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang menggabungkan data panel, yaitu kombinasi antara data time series dari tahun 2019-2023 dan data cross section dari 10 provinsi di Pulau Sumatera. Data tersebut diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) serta instansi terkait lainnya.

2.3 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, (Sugiyono, 2017). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data variabel X (independen) dan variabel Y (dependen).

2.4 Sampel

Sampel adalah sebagai bagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan populasi dalam penelitian, (Candra Susanto et al., 2024). Sampel yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kemiskinan, PDRB perkapita, populasi penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dengan menggunakan runtun waktu yaitu



dari tahun 2019-2023. Metode yang digunakan sebagai sampel adalah purposive sampling, yaitu teknik yang memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu secara sengaja dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus.

2.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yakni studi pustaka (library research) adalah teknik pengumpulan data melalui telaah dari berbagai macam literatur seperti jurnal, buku-buku, artikel, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian dan studi Internet (internet research) adalah cara mengumpulkan data dengan cara mencari data melalui internet.

2.6 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional dalam penelitian ini terdiri dari 2 jenis variabel yaitu pertama, variabel independen (variabel bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab berubahnya atau timbulnya variabel dependen (terikat) diantaranya PDRB Perkapita, Populasi Penduduk, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Kedua, variabel dependen (variabel terikat) yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas yaitu kemiskinan.

Tabel 1. Definisi Variabel

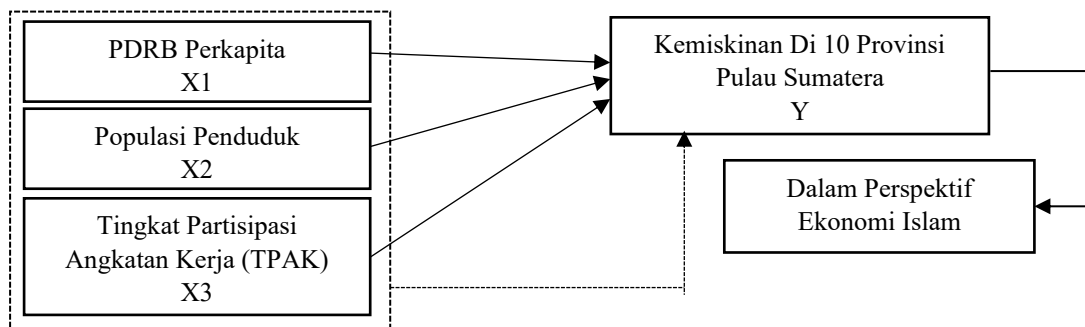
No	Definisi Variabel	Indikator	Skala
1.	Kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan dan non makanan, (Yusri, 2022).	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio (Ribu Jiwa)
2.	PDRB Perkapita menggambarkan rata-rata pendapatan yang diterima setiap individu dalam suatu wilayah dalam periode tertentu, (Dadek, Ahmad et al., 2024)	PDRB Perkapita Harga Konstan	Rasio (Ribu Rupiah)
3.	Populasi Penduduk adalah total individu yang tinggal di suatu wilayah geografis dalam periode tertentu, (Yenny & Anwar, 2020)	Jumlah Penduduk	Rasio (Ribu Jiwa)
4.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan persentase penduduk usia kerja yang menjadi angkatan kerja, (Assa Faellassuffa, 2021)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Rasio (Persen)

2.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dengan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. Dengan menggunakan model data panel yang terdiri dari Common Effect Model (CEM), Random Effect Model (REM), Fixed Effect Model (FEM). Untuk menentukan model yang paling tepat digunakan dalam mengelola data panel, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan dalam menetapkan model regresi data panel yaitu terdiri dari uji chow dan uji hausman, serta uji statistik yaitu uji-t, uji-f, dan koefisien determinasi dengan menggunakan alat analisis yaitu EViews versi 10.

2.8 Kerangka dan Hipotesis Penelitian

Kerangka teori menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Dalam penelitian ini, variabel bebas terdiri dari PDRB Perkapita, Populasi Penduduk, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Sementara itu, variabel terikatnya adalah Kemiskinan. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka kerangka pemikiran penelitian ini disusun sebagai berikut:



Gambar 2. Kerangka Berpikir

Berdasarkan Gambar 2 kerangka berpikir tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan (variabel Y) dipengaruhi oleh indikator seperti PDRB perkapita, populasi penduduk, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). PDRB perkapita (X1), mengukur rata-rata pendapatan masyarakat di suatu wilayah, di mana peningkatan PDRB perkapita umumnya berkontribusi pada pengurangan kemiskinan karena meningkatnya daya beli dan kesejahteraan ekonomi,



begitupun sebaliknya. Populasi penduduk (X2), dimana jumlah penduduk yang tinggi tanpa diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja dapat meningkatkan angka kemiskinan akibat tingginya ketergantungan ekonomi. Sementara itu, TPAK (X3) mengukur persentase penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi, rendahnya TPAK mencerminkan keterbatasan akses kerja, rendahnya kualitas tenaga kerja, serta minimnya peluang pekerjaan layak, yang semakin memperburuk kondisi ekonomi dan meningkatkan kemiskinan. Adapun hipotesis pada gambar kerangka berpikir di atas maka dapat ditentukan hipotesis sebagai berikut:

PDRB perkapita mencerminkan rata-rata pendapatan masyarakat dalam suatu wilayah dan secara teoritis diharapkan dapat menurunkan kemiskinan. Namun, peningkatan PDRB perkapita tidak selalu berdampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan apabila pertumbuhan ekonomi tidak merata. Berdasarkan hasil penelitian (Manalu et al., 2024) yang menunjukkan bahwa PDRB perkapita berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan. Artinya, meskipun ada kecenderungan penurunan kemiskinan saat PDRB perkapita meningkat, pengaruhnya belum cukup kuat secara statistik. Adapun hipotesis pertama dalam penelitian ialah

H1 : Diduga PDRB perkapita berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Populasi penduduk merupakan faktor yang dapat memengaruhi tingkat kemiskinan, tergantung pada kualitas dan produktivitas penduduk tersebut. Semakin tinggi populasi penduduk, semakin tinggi tingkat kemiskinan, terutama jika tidak diimbangi dengan lapangan kerja dan akses layanan dasar, pertumbuhan penduduk dapat memperburuk kemiskinan. Penelitian (Loka & Purwanti, 2022) menunjukkan bahwa populasi penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Adapun hasil hipotesis kedua dalam penelitian ialah

H2 : Diduga populasi penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencerminkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. TPAK yang tinggi menandakan semakin banyak masyarakat yang bekerja akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi, sehingga berpotensi menurunkan kemiskinan. Penelitian (Langoday & Man, 2024) menunjukkan bahwa TPAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, artinya peningkatan partisipasi kerja mampu menekan angka kemiskinan secara nyata. Adapun hipotesis ketiga dalam penelitian ini ialah

H3 : Diduga tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Pengaruh PDRB Perkapita, Populasi Penduduk, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja diduga secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Adapun hipotesis 4 dalam penelitian ini ialah

H4 : Diduga PDRB perkapita, Populasi Penduduk, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Pengujian

3.1.1 Uji Deskriptif

Uji deskriptif adalah proses analisis data statistik yang bertujuan untuk menggambarkan, merangkum, atau menyajikan data dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami, tanpa membuat kesimpulan atau generalisasi terhadap populasi.

Tabel 2. Uji Deskriptif

	PDRB Perkapita	Populasi Penduduk	TPAK	Kemiskinan
Mean	43195.38	5940.738	67.85040	583.1928
Median	37149.45	5461.850	68.49500	427.0300
Maximum	92930.20	15386.60	71.73000	1343.860
Minimum	23105.92	1455.680	63.13000	66.78000
Std. Dev.	21008.38	3961.484	2.243436	415.0012
Skewness	1.254475	0.942491	-0.506322	0.407335
Kurtosis	3.109056	3.239563	2.206485	1.667222
Jarque-Bera Probability	13.13901 0.001402	7.521967 0.023261	3.448153 0.178338	5.083300 0.078736
Sum	2159769.	297036.9	3392.520	29159.64
Sum Sq. Dev.	2.16E+10	7.69E+08	246.6172	8439074.
Observations	50	50	50	50

Berdasarkan Tabel 2 hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel PDRB perkapita memiliki nilai mean sebesar 43195.38, nilai median sebesar 37149.45, nilai tertinggi sebesar 92930.20, nilai terendah sebesar



23105.92 dan nilai standar deviasi sebesar 21008.38. Pada variabel populasi penduduk menunjukkan nilai mean sebesar 5940.738, nilai median sebesar 5461.850, nilai tertinggi sebesar 15386.60, kemudian nilai terendah sebesar 1455.680, dan standar deviasi sebesar 3961.484. Pada variabel TPAK memiliki nilai mean sebesar 67.85040, nilai median sebesar 68.49500, nilai tertinggi sebesar 71.73000, kemudian nilai terendah 63.13000, dan nilai standar deviasi sebesar 2.243436. Pada variabel terikat (dependen) yaitu kemiskinan hasilnya menunjukkan bahwa nilai mean sebesar 583.1928, nilai median 427.0300, nilai tertinggi sebesar 1343.860, kemudian nilai terendah sebesar 66.78000, dan nilai standar deviasi sebesar 415.0012.

3.1.2 Uji Chow

Uji chow dilakukan untuk menentukan pilihan model terbaik antara Commen Effect Model (CEM) dengan Fixed Effect Model (FEM). Berikut merupakan hasil uji chow:

Tabel 3. Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	296.637.156	-9,37	0.0000
Cross-section Chi-square	214.629.013	9	0.0000

Berdasarkan Tabel 3 uji chow, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas pada cross-section f dan cross-section chi-square menunjukkan hasil sebesar 0,0000 yang berarti nilai cross-section f dan cross-section chi-square lebih kecil dari ($< 0,05$). Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa model yang terpilih adalah fixed effect model (FEM). Maka, selanjutnya akan dilakukan Uji Hausman untuk memilih model terbaik antara FEM dan REM.

3.1.3 Uji Hausman

Uji hausman dilakukan untuk memilih model terbaik antara Random Effect Model (REM) dengan Fixed Effect Model (FEM). Berikut hasil uji hausman:

Tabel 4. Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	40.279.562	3	0.0000

Berdasarkan Tabel 4, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas pada cross-section random yaitu sebesar 0,0000 yang berarti nilai cross-section random lebih kecil dari ($< 0,05$), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa model yang terpilih adalah fixed effect model (FEM). Sehingga tidak perlu dilakukan uji LM.

Berdasarkan hasil persamaan regresi di atas, diantaranya uji chow dan uji hausman, maka model terbaik dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model (FEM) untuk menganalisis pengaruh PDRB Perkapita, Populasi Penduduk dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Terhadap Kemiskinan. Berdasarkan hasil estimasi Fixed Effect Model (FEM), maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y (\text{Kemiskinan}) = 1075.81365286 - 0.000833828045112 * X_1 - 0.0577927407672 * X_2 - 1.6694341809 * X_3 + [CX=F]$$

Berdasarkan persamaan di atas, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai Konstanta = 1075.81365286, artinya ketika nilai variabel PDRB Perkapita, Populasi Penduduk, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sama dengan nol maka Kemiskinan meningkat 1075.81365286.
2. Nilai koefisien beta variabel PDRB Perkapita sebesar - 0.000833828045112 jika nilai variabel lain konstan dan variabel PDRB Perkapita (X_1) mengalami peningkatan 1 satuan, maka variabel Kemiskinan (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0.000833828045112. Begitupun sebaliknya jika variabel lain konstan dan variabel PDRB Perkapita (X_1) mengalami penurunan 1 satuan, maka variabel Kemiskinan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0.000833828045112.
3. Nilai koefisien beta variabel Populasi Penduduk sebesar - 0.0577927407672, jika variabel lain konstan dan variabel Populasi Penduduk (X_2) mengalami peningkatan 1 satuan, maka variabel Kemiskinan (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0.0577927407672. Begitupun sebaliknya jika nilai variabel lain konstan dan variabel Populasi Penduduk (X_2) mengalami penurunan 1 satuan, maka variabel Kemiskinan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0.0577927407672.
4. Nilai koefisien beta variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar - 1.6694341809, jika nilai variabel lain konstan dan variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (X_3) mengalami peningkatan 1 satuan, maka variabel Kemiskinan (Y) akan mengalami penurunan sebesar 1.6694341809. Begitupun sebaliknya jika nilai variabel lain konstan dan variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (X_3) mengalami penurunan 1 satuan, maka variabel Kemiskinan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 1.6694341809.

3.1.4 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara variabel dependen dan variabel independen. Uji ini dilakukan untuk memastikan bahwa data terbebas dari multikolinearitas. Adapun hasil uji ini dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 5. Uji Multikolinearitas

	PDRB Perkapita	PP	TPAK
PDRB Perkapita	1.000000	-0.173954	-0.341582
PP	-0.173954	1.000000	0.244294
TPAK	-0.341582	0.244294	1.000000

Berdasarkan Tabel 5 hasil uji multikoleniaritas di atas, dapat dilihat bahwa dari setiap variabel bebas yaitu PDRB perkapita, populasi penduduk dan tingkat partisipasi angkatan kerja tidak ada yang melebihi 0,85. Sehingga uji tersebut dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas (independen) tidak memiliki masalah multikoleniaritas.

3.1.5 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas. Gejala ini disebabkan karena adanya perbedaan antara varian residual satu dengan yang lain. Adapun hasil uji heteroskedastisitas pada tabel di bawah ini:

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.048.875	1.253.906	-0.083649	6,4847222
PDRB Per Kapita	-0.001029	0.000927	-1.109.582	1,9048611
PP	0.014904	0.010573	1.409.611	1,1597222
TPAK	-0.320665	2.085.224	-0.153780	6,1013889

Berdasarkan Tabel 6 hasil uji heteroskedastisitas di atas, dengan menggunakan metode glejser. Didapatkan hasil nilai probabilitas dari masing-masing variabel bebas melebihi $\alpha = 5\%$ (0,05), sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa model yang ada dalam penelitian tidak mengandung masalah heteroskedastisitas.

3.1.6 Uji Parsial (Uji t)

Uji t-statistik dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7. Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.075.814	2.276.179	4.726.402	0.0000
PDRB Perkapita	-0.000834	0.001684	-0.495261	4,3284722
PP	-0.057793	0.019193	-3.011.068	0.0047
TPAK	-1.669.434	3.785.245	-0.441037	4,5958333

Berdasarkan Tabel 7 di atas, hasil regresi data panel dengan metode Fixed effect model (FEM), menunjukkan hasil bahwa:

1. Variabel PDRB Perkapita (X1) memiliki nilai koefisien sebesar -0.000834 dengan nilai probabilitas (signifikansi) sebesar 0.6233 lebih dari ($> 0,05$), maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel PDRB Perkapita memiliki arah hubungan negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan (Y).
2. Variabel Populasi Penduduk (X2) memiliki nilai koefisien sebesar -0.057793 dengan nilai probabilitas (signifikansi) sebesar 0,0047 kurang dari ($< 0,05$), maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel Populasi Penduduk memiliki arah hubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan (Y).
3. Variabel TPAK (X3) memiliki nilai koefisien sebesar -1.669434 dengan nilai probabilitas (signifikansi) sebesar 0,6618 lebih dari ($> 0,05$), maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel TPAK memiliki arah hubungan negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kemiskinan (Y).

3.1.7 Uji Simultan (Uji f)

Uji f dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Adapun uji f dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Uji f

F-statistic	1.716.848
Prob(F-statistic)	0.000000

Berdasarkan Tabel 8 hasil Uji F, dapat dilihat bahwa hasil dari uji f yaitu f statistic 1716,848 dengan nilai probabilitas f-statistic sebesar 0,000000 kurang dari ($< 0,05$), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel independen (X) PDRB perkapita, populasi penduduk, dan tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh signifikan secara simultan (bersamaan) terhadap variabel kemiskinan (Y).

3.1.8 Uji Koefisien Determinasi (R²)



Koefisien determinasi (R^2) merupakan sumbangan pengaruh yang diberikan dari variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Hasil output R-square dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 9. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.998207
Adjusted R-squared	0.997626

Tabel 9 di atas menunjukkan Koefisien Determinasi (R-Squared) dengan ditunjukkan pada nilai R-Squared sebesar 0,998207 atau 99,8207% . Nilai Koefisien Determinasi tersebut menunjukkan bahwa kontribusi variabel independen yang terdiri dari 3 yaitu PDRB perkapita, populasi penduduk dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap kemiskinan sebesar 99,8207%, yang sisanya ($100 - 99,8207\% = 0,1793\%$) yang dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Pengaruh PDRB Perkapita terhadap Kemiskinan di 10 Provinsi Pulau Sumatera

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB perkapita secara parsial memiliki hubungan negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di 10 Provinsi Pulau Sumatera dengan hasil nilai koefisien -0.000834 dan probabilitas sebesar $0,6233 > 0,05$ yang berarti hasil ini H_0 diterima dan H_1 ditolak dan hasil ini membuktikan hipotesis pertama. Bisa disimpulkan bahwa PDRB perkapita tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di 10 Provinsi Pulau Sumatera. Hal ini sejalan dengan penelitian, (Miftah et al., 2025). Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun PDRB perkapita meningkat kemiskinan tetap, hal ini dapat disebabkan faktor lain yang lebih berpengaruh, selain itu penelitian ini memiliki hasil jika PDRB perkapita memiliki hubungan negatif menandakan bahwa peningkatan PDRB perkapita tidak selalu mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh terutama jika pertumbuhan ekonomi tersebut hanya dinikmati oleh kelompok tertentu dan tidak berdampak langsung pada kelompok miskin.

Hasil ini sejalan dengan pandangan menurut Michael P. Todaro & Stephen C. Smith yang menekankan bahwa pembangunan ekonomi sejati tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan perkapita, tetapi juga dari pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan harga diri, dan kebebasan memilih kehidupan yang lebih baik, (F. Amalia et al., 2022). Hasil ini mencerminkan belum optimalnya capaian pembangunan dalam tiga pilar utama menurut Todaro dan Smith. Pertama, dalam pemenuhan kebutuhan dasar (sustenance) yang belum sepenuhnya tercapai, karena kelompok miskin belum merasakan secara langsung manfaat pertumbuhan PDRB perkapita dalam memperbaiki akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar seperti pangan, pendidikan dan kesehatan. Kedua, dalam peningkatan harga diri (self-esteem) belum meningkat secara merata, karena masyarakat miskin masih hidup dalam kondisi ketertinggalan dan ketergantungan ekonomi, sehingga mereka belum memiliki kesempatan yang setara untuk berkontribusi dalam pembangunan. Ketiga, kebebasan dari keterikatan (freedom from servitude) belum terwujud, karena selama kemiskinan tetap tinggi dan akses terhadap sumber daya produktif terbatas, masyarakat rentan masih terjebak dalam kemiskinan yang menghambat kebebasan dalam menentukan kehidupan yang lebih baik. Dalam hal ini PDRB perkapita yang meningkat namun tidak signifikan menurunkan kemiskinan menunjukkan adanya kesenjangan distribusi hasil pembangunan, dimana pembangunan belum diikuti oleh pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan perlu diarahkan agar lebih inklusif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

3.2.2 Pengaruh Populasi Penduduk terhadap Kemiskinan di 10 Provinsi Pulau Sumatera

Hasil penelitian menunjukkan bahwa populasi penduduk secara parsial memiliki hubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di 10 Provinsi Pulau Sumatera dengan hasil nilai koefisien -0.057793 dan probabilitas sebesar $0,0047 < 0,05$ yang berarti H_0 ditolak H_1 diterima dan hasil ini tidak terbukti secara hipotesis kedua. Artinya populasi penduduk dapat mengurangi kemiskinan di 10 Provinsi Pulau Sumatera. Hal ini sejalan dengan penelitian (Dinata et al., 2020). Yang menyatakan bahwa penduduk sebagai pemicu pembangunan karena dengan populasi yang banyak bisa menjadi potensial dalam mengurangi kemiskinan. Jumlah penduduk yang tinggi dapat menjadi potensi produktif dalam pembangunan ekonomi seperti pendidikan, infrastruktur, dan penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas, sehingga standar hidup yang layak dapat dicapai oleh lapisan masyarakat di setiap daerah, sehingga dapat mengurangi kemiskinan.

Hasil ini diperkuat pandangan Michael P. Todaro & Stephen C. Smith yang menyatakan bahwa pembangunan tidak hanya bergantung pada indikator ekonomi semata, tetapi juga pada pengembangan sumber daya manusia. Populasi penduduk yang besar dapat menjadi kekuatan pembangunan apabila diarahkan pada penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Penurunan tingkat kemiskinan akibat bertambahnya jumlah penduduk menunjukkan bahwa kebutuhan dasar masyarakat (sustenance) dapat terpenuhi melalui kontribusi produktif penduduk dalam perekonomian. Selain itu, meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan juga berkontribusi pada peningkatan harga diri (self-esteem), karena mereka merasa memiliki nilai dan daya saing dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Terakhir, dengan berkurangnya ketergantungan pada bantuan dan meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, maka kebebasan dari keterikatan (freedom



from servitude) dapat tercapai, (F. Amalia et al., 2022). Oleh karena itu, temuan ini memperkuat pandangan Todaro & Smith bahwa pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang menempatkan manusia sebagai pusatnya.

3.2.3 Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Kemiskinan di 10 Provinsi Pulau Sumatera

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja secara parsial memiliki hubungan negatif dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di 10 Provinsi Pulau Sumatera. Memperoleh nilai koefisien sebesar -1.669434 dan nilai probabilitas sebesar $0,6618 > 0,05$ yang berarti H_0 diterima H_1 ditolak dan hasil ini tidak terbukti dengan hipotesis ketiga. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di 10 Provinsi Pulau Sumatera. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian (Sianturi et al., 2024), yang menjelaskan bahwa meskipun TPAK meningkat kemiskinan tetap rendah karena faktor-faktor variabel lain yang lebih berpengaruh terhadap kemiskinan seperti UMP dan pendidikan, selain itu juga penelitian ini menunjukkan hasil jika TPAK memiliki hubungan negatif yang menandakan bahwa peningkatan TPAK tidak serta merta dapat berdampak langsung pada kemiskinan. Hal ini dapat disebabkan oleh kualitas angkatan kerja yang masih rendah serta terbatasnya penciptaan lapangan kerja produktif yang mampu menyerap tenaga kerja secara optimal. Tanpa peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perluasan lapangan kerja yang layak, peningkatan jumlah angkatan kerja justru dapat menciptakan tekanan baru dalam pasar tenaga kerja dan memperbesar risiko pengangguran. Oleh karena itu, kebijakan pengurangan kemiskinan perlu diiringi dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan kerja, serta perluasan lapangan kerja.

Adapun teori yang mendukung penelitian ini menurut Michael P. Todaro & Stephen C. Smith, menyatakan bahwa partisipasi kerja belum tentu mencerminkan keberhasilan pembangunan jika tidak mampu memenuhi tiga tujuan utama pembangunan, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar (sustenance), peningkatan harga diri (self-esteem), dan kebebasan dari ketergantungan (freedom from servitude), (F. Amalia et al., 2022). Ketika masyarakat hanya terserap dalam pekerjaan yang tidak produktif, mereka tetap kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya, merasa tidak dihargai secara sosial maupun ekonomi, dan masih bergantung pada bantuan. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi yang sejati menurut Todaro & Smith tidak hanya berfokus pada peningkatan angka partisipasi kerja, tetapi juga pada kualitas dan keberdayaan dari pekerjaan yang tersedia bagi masyarakat.

3.2.4 Pengaruh PDRB Perkapita, Populasi Penduduk dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Secara Simultan Terhadap Kemiskinan di 10 Provinsi Pulau Sumatera

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait interaksi antara PDRB Perkapita, Populasi Penduduk dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Kemiskinan di 10 Provinsi Pulau Sumatera, diperoleh nilai probabilitas f-statistik sebesar $0,000000 < 0,05$. Yang artinya PDRB Perkapita, Populasi Penduduk dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di 10 Provinsi Pulau Sumatera, yang berarti hasil ini terbukti secara hipotesis keempat. Sehingga pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor ini penting untuk merumuskan kebijakan yang efektif dalam mengelola potensi dan tantangan dalam kemiskinan.

3.2.5 Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Kemiskinan dalam ekonomi islam dapat dijelaskan sebagai kondisi di mana sebagian orang atau kelompok memiliki tingkat kehidupan yang rendah, yang berarti adanya suatu tingkat dimana sejumlah atau segolongan orang mempunyai kekurangan materi dibandingkan dengan standar umum kehidupan dalam masyarakat. Al-Ghozali mengartikan bahwa kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Menurut pandangan islam, kemiskinan dapat membahayakan akhlak, keluarga, serta masyarakat sekitarnya dan memberikan dampak negatif. Mannan menegaskan bahwa kemiskinan dalam islam haruslah dilihat dalam konsep integral antara aspek moral (budaya dan spiritual) dan aspek material. Selain itu, Abu Hazm menyebutkan bahwa penyebab terjadinya kemiskinan karena suatu kondisi dimana tingkat konsumsi atau kebutuhan lebih tinggi daripada pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan, (Kartika et al., 2024). Berdasarkan ilmu fikih, kemiskinan adalah kekurangan dalam hal kebutuhan pokok, pakaian, dan kelangsungan hidup. Agama islam menganjurkan untuk mengeluarkan zakat atau bersedekah yang dipergunakan sebagai kepentingan umat dan masyarakat, terutama bagi orang-orang miskin. Kemiskinan juga dalam islam dipandang sebagai kerusakan yang dapat membahayakan jiwa dan iman seseorang karena sangat dekat dengan kekufuran. Dengan hidup miskin, seseorang tidak dapat melakukan kewajiban agama secara maksimal, tidak dapat memberikan pendidikan yang baik dan akses kehidupan serta kesehatan yang layak. Oleh karena itu, islam melarang umatnya meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah, baik secara agama, ilmu serta ekonomi, (Kirana & Ayuningsasi, 2022). Dalam teori ekonomi islam, islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan dan sumber daya secara merata di antara seluruh lapisan masyarakat, (Zunaidi et al., 2023). Prinsip-prinsip dasar ekonomi islam ini sejalan dengan pandangan Ibnu Khaldun tentang distribusi yang adil seperti zakat dan wakaf sebagai instrumen redistribusi kekayaan, memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Tujuan utama zakat selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga untuk mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat agar dapat tercapai secara maksimal, (Ghofur & Suhendar, 2021). Dengan demikian, pemikiran Ibnu Khaldun memberikan dasar yang kuat untuk menciptakan sistem ekonomi berlandaskan pada prinsip-prinsip kesejahteraan sosial, (Gusfira et al., 2024).



4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel PDRB perkapita dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di 10 Provinsi Pulau Sumatera. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien PDRB perkapita sebesar $-0,000834$ dengan probabilitas sebesar $0,6233$ ($> 0,05$) dan koefisien tingkat partisipasi angkatan kerja $-1,669434$ dengan probabilitas $0,6618$ ($> 0,05$), temuan ini menunjukkan bahwa meskipun PDRB perkapita dan tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat, belum mampu secara signifikan menekan kemiskinan, sedangkan populasi penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dibuktikan dengan nilai koefisien sebesar $-0,057793$ dan probabilitas $0,0047$ ($< 0,05$). Artinya, peningkatan populasi di 10 Provinsi Pulau Sumatera justru mampu menurunkan kemiskinan secara nyata, sementara peningkatan PDRB perkapita dan tingkat partisipasi angkatan kerja belum menunjukkan pengaruh signifikan dalam menekan kemiskinan, yang bisa disebabkan karena ketimpangan distribusi pendapatan, kualitas tenaga kerja, dan terbatasnya akses terhadap pekerjaan produktif. Secara simultan, PDRB perkapita, populasi penduduk, dan tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di 10 Provinsi Pulau Sumatera dengan nilai f -statistic sebesar $1716,848$ dan probabilitas $0,000000$ ($< 0,05$), menunjukkan bahwa ketiganya secara bersama-sama sangat memengaruhi tingkat kemiskinan di 10 Provinsi Pulau Sumatera, sehingga intervensi kebijakan ekonomi dan sosial yang terintegrasi menjadi penting untuk dilakukan. Dalam perspektif ekonomi Islam, penanggulangan kemiskinan tidak hanya difokuskan pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada keadilan distribusi kekayaan, pemberdayaan umat, dan perlindungan terhadap kelompok lemah melalui instrumen-instrumen seperti zakat, wakaf, dan infak. Maka, kebijakan pengentasan kemiskinan perlu diarahkan pada pemerataan hasil pembangunan serta penguatan lembaga-lembaga sosial Islam yang mampu menyalurkan kekayaan secara adil dan produktif kepada masyarakat miskin. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan tiga variabel independen dan cakupan wilayah terbatas pada Pulau Sumatera, sehingga hasilnya belum mencerminkan kondisi nasional secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti tingkat Pendidikan, pengeluaran sosial, atau indeks pembangunan manusia (IPM), serta memperluas cakupan wilayah agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif dan implementatif.

REFERENCES

- Amalia, A. F., Sadik, J., Azzahra, R. D., & Mubarak, I. T. (2024). Analisis Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur Tahun 2023. *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 5(1), 140–151. <https://doi.org/10.21107/bep.v5i1.25948>
- Amalia, F., Sinaga, R., Soeyatno, R. F., Silitonga, D., Solikin, A., Hubbansyah, A. K., Siregar, R. T., Maulina, D., Kusumaningrum, R., Sahamony, N. F., Litriani, E., & Ladjin, N. (2022). *Ekonomi Pembangunan (Edisi Pert)*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Assa Faellassuffa, E. Y. (2021). Kajian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Indeks. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(1), 49–61.
- Azwina, R., & Dharma, B. (2023). Peran Ekonomi Kreatif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Peningkatan Pendapatan Pelaku Industri Kreatif Dalam Perspektif ekonomi Islam di Kota Medan. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(6), 3680–3699. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i6.4157>
- Butar Butar, R., Albar Tanjung, A., & Masharif al-Syariah. (2023). Analisis Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah, PDRB, dan Pengeluaran Perkapita terhadap kemiskinan di Pulau Sumatera Tahun 2016-2021. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 402–420. <https://doi.org/10.30651/jms.v8i1.17587>
- Candra Susanto, P., Ulfah Arini, D., Yuntina, L., Panatap Soehaditama, J., & Nuraeni, N. (2024). Konsep Penelitian Kuantitatif: Populasi, Sampel, dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka). *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.38035/jim.v3i1.504>
- Candrasa, L. (n.d.). *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. PT Inovasi Pratama Internasional.
- Dadek, Ahmad, T., ZA, S., & Syahbandir, M. (2024). *Perencanaan Pembangunan Daerah Di Indonesia*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Pemerintah Aceh.
- Dinata, S. R., Romus, M., & Yanti. (2020). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Riau Tahun 2003-2018. *Jurnal Al-Iqtishad*, 2, 116–137.
- Fanny Cantika Roseline, E. M. (2022). Analisis Pengaruh PDRB Perkapita, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Lampung. *Cakrawala Repositori IMWI*, 5(2), 1–23. <https://doi.org/10.52851/cakrawala.v5i2.122>
- Ghofur, R. A., & Suhendar. (2021). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi pada Organisasi Pengelola Zakat dalam Memaksimalkan Potensi Zakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1866–1879. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2137>
- Gofur, A., Ghofur, R. A., & Fachri, A. (2025). Analysis Of The Effect Of Fiscal Decentralization, Regional Financial Performance And Zakat Revenue On Poverty Levels In Sumbagsel In An Islamic Economic Perspective. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(1), 15–30. <https://doi.org/10.30868/ad.v9i001.8765>
- Gusfira, A., Bunaia, A., Sinka, V., Zein, A. W., Islam, U., Sumatera, N., & Medan, U. (2024). Pengaruh Pemikiran Ibnu Khaldun terhadap Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia. *MORAL: Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 1(4), 295–301. <https://doi.org/10.61132/moral.v1i4.391>
- Hasibuan, E. Y., & Rukiah. (2023). Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara. *PROFJES: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 626–642. <https://doi.org/10.24952/profjes.v2i1.10118>
- Janah, S. P., Etika, C., & Bahtiar, M. Y. (2024). The Influence Of Domestic Investment, Foreign Investment, And Road Infrastructure Development On Economic Development Inequality In 8 Indonesian Provinces In 2013-2022 In The Perspective Of Islamic Economics. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (JASMIEN)*, 05(02), 78–89.



- <https://doi.org/10.54209/jasmien.v5i02.899>
- Kartika, M., Kurniasih, E. P., Dosinta, N. F., & Wahid, W. (2024). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Pengangguran, Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat : Perspektif Ekonomi Islam. *WACANA EKONOMI (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 23(1), 59–71. <https://doi.org/10.22225/we.23.1.2024.59-71>
- Khasanah, W. E., Ardiantika, A., Senandung Kala, B., & Januarta, V. E. (2024). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Persentase Penduduk Miskin di Indonesia pada Tahun 2021-2023. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4(3), 850–857. <https://doi.org/10.54373/ifjeb.v4i3.1442>
- Kirana, D. N., & Ayuningsasi, A. A. K. (2022). Pengaruh Remitansi, Foreign Direct Investment, Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 6(2), 35. <https://doi.org/10.24843/eeb.2022.v11.i01.p04>
- Langoday, T. O., & Man, S. (2024). the Role of Population Growth, Education Level, Labor Force Participation Rate on Poverty Level in Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(2), e3011. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i2.3011>
- Lestary Fitriany. (2021). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita, Belanja Daerah dan Zakat Terhadap Kemiskinan di Kota Dumai. *Al-Hisbah Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 12–23. <https://doi.org/10.57113/his.v1i1.75>
- Loka, R. D. P., & Purwanti, P. A. P. (2022). the Effect of Unemployment, Education and the Number of Population on the Poverty Level of Regency/City in Bali Province. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (JEBAR)*, 6(2), 1046. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v6i2.5357>
- Manalu, S. P. R., Lubis, H., Nasution, A. H., Pakpahan, E., Hajatina, H., & Bukit, A. N. (2024). Analisis Pengaruh Laju Pertumbuhan PDRB, PDRB Per Kapita, Dan Gini Ratio Terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2022. *Value*, 4(2), 237–253. <https://doi.org/10.36490/value.v4i2.1065>
- Matondang, K. A., Nasution, N. F., Hasibuan, Z. H., & Siagian, A. P. (2024). Analisis Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. *MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production*, 2(2), 460–468. <https://doi.org/10.57235/mantap.v2i2.2927>
- Miftah, S., Andiny, P., & Syahputra, R. (2025). Analisis Pengaruh Variabel Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(3), 5418–5431. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i3.7127>
- Mirah, M. R., Kindangen, P., & Rorong, I. P. F. (2020). Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 21(1), 85–100. <https://doi.org/10.35794/jpek.d.32815.21.1.2020>
- Oktavian Oki, Mardhiyah, H., & Yulistia, D. (2023). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2018-2022 Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *SALAM: Islamic Economics Journal*, 4(2), 89–108. <https://doi.org/10.24042/slm.v4i2.20872>
- Oktaviani, Y., Etika, C., & Setyanto, A. R. (2024). The Effect of Government Expenditure and Human Capital on the Trend of Economic Growth in Indonesia 2014-2023. *Annual International Conference on Islamic Economics and Business (AICIEB)*, 4, 181–191. <https://doi.org/10.18326/aicieb.v4i0.698>
- Pangestyuty, F. W., & Prasetyia, F. (2021). *Ekonomi Pembangunan: Kajian Teoritis dan Studi Kasus*. Universitas Brawijaya Press.
- Rachmawati, M. (2020). Kontribusi sektor UMKM pada upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. *INTELEKTIVA : Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 1(7), 1–13. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/86>
- Sari, Y. A. (2021). Pengaruh Upah Minimum Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 10(2), 121–130. <https://doi.org/10.35906/jec001.v10i2.785>
- Sianturi, A. F., Tampubolon, A., Hidayat, N., Nasution, M. D., & Sianturi, R. (2024). Pengaruh Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Kota Medan (2014-2023). *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 739–750. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2606>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono, P. L. (2021). *Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, kualitatif, dan cara mudah menulis artikel pada jurnal internasional)*.
- Supriatna, S. (2023). Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pendidikan, dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Peningkatan Pendapatan Perkapita di Indonesia 2011-2020. *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bceses.v3i1.6995>
- Tando'Lembang, S., & Kalangi, J. B. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Tana Toraja. *Jurnal Berkala Ilmiah ...*, 23(8), 73–84. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/download/50522/43882>
- Todi, D. S., Anggraeni, E., & Susanto, I. (2025). Pengaruh TPAK , Pendidikan , dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Termiskin Se-Indonesia. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 7(2), 135–140. <https://doi.org/10.37034/infeb.v7i2.1108>
- Vania Grace Sianturi, M. Syafii, & Ahmad Albar Tanjung. (2021). Analisis Determinasi Kemiskinan di Indonesia Studi Kasus (2016-2019). *Jurnal Samudra Ekonomika*, 5(2), 125–133. <https://doi.org/10.33059/jse.v5i2.4270>
- Widodo, A. (2021). *Indikator Makro Ekonomi Daerah: Instrumen Evaluasi Kinerja dan Perencanaan Pembangunan (Edisi Pert)*. Guepedia.
- Yenny, N. F., & Anwar, K. (2020). Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Ekonomika Indonesia*, 9(2), 19. <https://doi.org/10.29103/ekonomika.v9i2.3181>
- Yusri, M. (2022). *Integrasi Kebijakan Regional dan Kemiskinan (Edisi Pert)*. Umsu Press.
- Zunaidi, A. ., Humaira, V. A. ., Nabil, N. ., Saputra, G. ., Ismail, I. ., & Murliati, M. (2023). *Manajemen Zakat dan Waqaf*. 3(2), 40–44. https://repository.iainkediri.ac.id/1034/1/Manajemen_Ziswaf_2023.pdf